**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH,KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH TAHUN BERJALAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI YOGYAKARTA TAHUN 2014-2017**



Oleh:

*Wawan Prasetyo*

*14061199*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCUBUANA YOGYAKARTA**

**2018**

**SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Wawan Prasetyo

NIM : 14061199

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Jenis : Skripsi

Judul :**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH, KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH TAHUN BERJALAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2017**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalty kepada Perpustakaan UMBY atau penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMBY, tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMBY, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2019

Yang Menyatakan,

Wawan Prasetyo

**ABSTRAK**

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH, KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH TAHUN BERJALAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2017**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Kenaikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah tahun berjalan pada Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2017. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum sedangkan untuk variable dependen yang digunakan adalah Belanja Modal Daerah tahun berjalan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten / kota diProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaporkan secara rutin laporan realisasi estimasi pendapatan dan pengeluaran daerah(APBD) dari tahun 2014 hingga 2017 untuk Dirjen Perimbangan Keuangan PemerintahDaerah ([www.djpkpd.go.id](http://www.djpkpd.go.id)). Metode analisa data dibantu dengan menggunakan Software SPSS 23.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap Alokasi Belanja Modal tahun berjalan, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh secara negatif terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah tahun berjalan, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh secara positif terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah tahun berjalan, Kenaikan PAD tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah tahun berjalan, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah tahun berjalan.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Belanja Modal

**ABSTRACT**

**THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL RATIO, ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE INCREASE, AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION IN THE DISTRICT / CITY OF YOGYAKARTA PRIVATE REGIONS PROVINCE IN YEAR 2014-2017**

*This research aims to analyze the effect of Regional Financial Ratios, Increase in Regional Original Revenue, General Allocation Funds for the Allocation of Regional Capital Expenditures for the current year in Districts / Cities in Yogyakarta Special Province in 2014-2017. The independent variables used in this study are Regional Financial Independence Ratios, Regional Financial Effectiveness Ratios, Regional Financial Efficiency Ratios, increasing of Regional Original Revenues, and General Allocation Funds while for the dependent variable used is the Regional Capital Expenditures for the current year.*

*The sample used in this study is the regency / city of the Special Province of Yogyakarta which regularly reports on the realization of estimated regional income (APBD) from 2014 to 2017 for the Director General of Regional Government Financial Balance (www.djpkpd.go.id). Data analysis method is assisted by using SPSS 23 Software.*

*The results of this study indicate that the Regional Financial Independence Ratio has no positive effect on the allocation of capital expenditures for the current year, Regional Financial Effectiveness Ratio negatively influences the Allocation of Regional Capital Expenditures for the year, Regional Financial Efficiency Ratio has a positive effect on the current year's Regional Capital Expenditures The increase in PAD does not affect the allocation of Regional Capital Expenditures for the current year, the General Allocation Fund has a positive effect on the allocation of Regional Capital Expenditures for the current year.*

*Keywords: Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Allocation of Capital Expenditures.*

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang dewasa ini mengalami peningkatan dalam sektor ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2018 kuartal pertama mencapai angka 5,06 persen (BadanPusatStatistik, 2018). Pertumbuhan ekonomi nasional ini tidak lepas dari pengaruh besarnya kontribusi pertumbuhan pendapatan daerah setiap provinsi di Indonesia. Pendapatan daerah merupakan faktor utama yang merupakan pundi-pundi pemasukan untuk negara.

Analisis rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Halim, 2008). Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2008).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai pembagian dan pembentukan daerah yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi, Desentralisasi fiscal memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya konkrit reformasi keuangan daerah.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tugas akhir ini dengan judul **“PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH,KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH TAHUN BERJALAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI YOGYAKARTA TAHUN 2014-2017”**

1. **LANDASAN TEORI**

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkanhasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehinggga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilaksanakan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Ardhini, 2011)

Rasio Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnyaPendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan.Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Realitas hubungan fiscal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Halim,2012). Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ardhini, 2011).

Rasio pertumbuhan *(growth ratio)* mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut berupa laporan APBD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta yang telah dipublikasikan yang diambil dari database resmi Provinsi Yogyakarta selama tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan analisa statistik deskriptif kuantitatif.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil uji t pada output SPSS diatas didapatkan hasil sig sebesar 0.079 dimana hasil tersebut lebih besar dari α sebesar 0.05 sehingga H1 ditolak dan H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan.

Berdasarkan hasil t Hitung pada output SPSS diatas didapatkan hasil sig sebesar 0.006 dimana hasil tersebut lebih kecil dari α sebesar 0.05 sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan.

Berdasarkan hasil t Hitung pada output SPSS diatas didapatkan hasil sig sebesar 0.002 dimana hasil tersebut lebih kecil dari α sebesar 0.05 sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan.

Berdasarkan hasil t Hitung pada output SPSS diatas didapatkan hasil sig sebesar 0.366 dimana hasil tersebut lebih besar dari hasil α sebesar 0.05 sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kenaikan PAD tidak berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan.

Berdasarkan hasil t Hitung pada output SPSS diatas didapatkan hasil sig sebesar 0.001 dimana hasil tersebut lebih kecil dari α sebesar 0.05 sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan.

Berdasarkan output hasil olah data SPSS diatas didapatkan hasil F hitung sebesar 20.405 dan tingkat signifikan 0.001 sedangkan untuk hasil F tabel dengan df1= 6-1 = 5 dan df2= 20-6= 14 didapatkan hasil sebesar 2.96. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dikarenakan nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikan < 0.05.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**a.** **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta uji hipotesis dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t), rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2014-2017 tidak berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal tahun berjalan daerah.
2. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t), rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten/kotadi Provinsi Yogyakarta tahun 2014-2017 berpengaruh secara negatif terhadap alokasi belanja modal tahun berjalan daerah tahun berjalan.
3. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t), rasio efisiensi keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2014-2017 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berjalan daerah.
4. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t), kenaikan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2014-2017 tidak berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan.
5. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t), DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2014-2017 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan.
6. Berdasarkan uji hipotesis secara simultan (uji F), rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, kenaikan PAD, dan dana alokasi umum daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2014-2017 berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan.

## b. SARAN

1. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta agar kedepanya lebih meningkatkan tingkat keefisienan daerah dalam hal biaya yang dikeluarkan untuk belanja daerah dengan besarnya pendapatan asli daerah yang didapatkan, karena berdasarkan penelitian ini, tingkat efisiensi pemerintah daerah berpengaruh besar terhadap besarya belanja modal daerah yang dialokasikan, hal ini memiliki tujuan agar tingkat alokasi belanja modal dapat terus meningkat dibandingkan dengan belanja karyawan agar fokus utama pemerintah dalam penyediaan saran dan prasarana untuk wadah dalam upaya pelayanan masyarakat yang bagus dapat memuaskan. Sehingga masyarakat pun akan lebih mudah untuk meningkatan produktivitasnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rentang waktu yang lebih lama sehingga data observasi yang digunakan akan lebih banyak sehingga hasil yang didapatkan lebih relevan.
3. Penambahan variabel baru dalam penelitian selanjutnya baik variabel independen ataupun dependen untuk melengkapi penelitian ini.
4. Penulis merekomendasikan variabel Rasio Sensitivitas Keuangan Daerah dan atau Kecenderungan Alokasi Belanja Daerah untuk penelitian selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, S. A. (2006). studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubunganya dengan belanja pemerintah daerah . *Jurnal Akuntansi Pemerintah* , 17-32.

http:// www. Balipost. Co. Id.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Andit.

Pp no 61 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Republik Indonesia. 2004. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta: Ghalia Indah.

Syukriy, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU No 34 tahun 2000.

www. Bps. go. id

www. depkeu. djpk. go. Id.